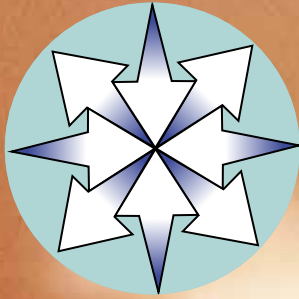


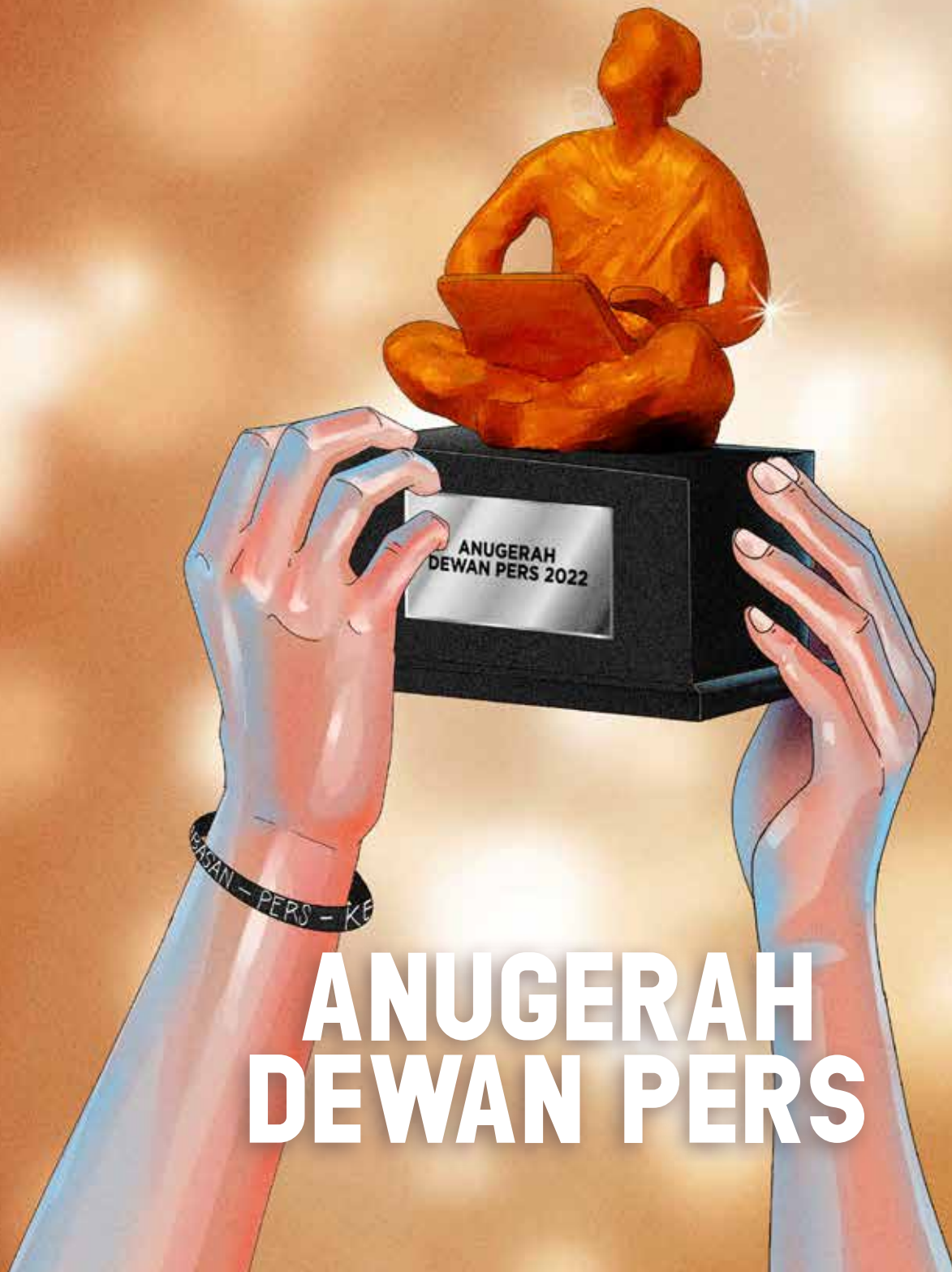
VOL. 36 DESEMBER 2022



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS



ANUGERAH DEWAN PERS



LAPORAN UTAMA

04 Mereka yang Terbaik



03 KABAR KEBON SIRIH

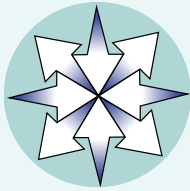
10 OPINI

12 TEROPONG

16 GRAFIK

17 LINTAS BERITA

22 GALERI



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:**Dewan Pengarah****Ketua:**

M Agung Dharmajaya

Anggota Dewan Pers:

Yadi Hendriana,

Arif Zulkifli,

Totok Suryanto,

Ninik Rahayu,

Paulus Tri Agung Kristanto

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/**Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Abdul Salam Fadli,

Reynaldo Adair,

Imam Suwandi

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,

Reza Andreas,

Elly Savitri Damayanthi,

Watini

Desain: Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers,

Jl. Kebon Sirih No.32-34,

Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota

Jakarta 10110

Telp: 021-3521488, 021-3504877,

021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:**Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.

Anugerah Dewan Pers

Desember adalah bulan anugerah. Begitulah kami menyebutnya. Ya, di bulan Desember 2022 inilah Dewan Pers menyelenggarakan agenda tahunan Anugerah Dewan Pers (ADP). Tahun 2022 adalah kali kedua ADP diselenggarakan, setelah diawali tahun lalu. Kami memilih Bandung sebagai lokasi puncak acara ADP 2022. Tentu dengan pertimbangan antara lain, bahwa Bandung merupakan salah satu kota perjuangan. Sebuah kota yang juga dikenal memiliki tradisi pers kuat.

Para peserta, dan pada akhirnya menjadi pemenang ADP 2022, telah diseleksi oleh belasan juri melalui proses yang cukup panjang. Dari mulai penjurian babak penyisihan hingga babak final. ADP 2022, sebagaimana tahun sebelumnya, kami selenggarakan sebagai upaya mengapresiasi karya-karya jurnalistik yang berkualitas dan tunduk pada UU Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Juga untuk mengapresiasi perusahaan pers yang telah menjalankan bisnis pers secara profesional, sejalan dengan kaidah-kaidah manajemen pers yang sehat dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan dan daftar pemenang ADP 2022 inilah yang kemudian kami turunkan dalam rubrik laporan utama ETIKA Edisi Desember 2022. Selamat untuk para pemenang Anugerah Dewan Pers (ADP) 2022.

Di bulan Desember, pembaca, Dewan Pers juga memiliki tradisi memberikan "Catatan" terhadap aktivitas dan isu-isu tentang pers yang kami anggap perlu mendapat perhatian serius sepanjang tahun berjalan. Di ujung tahun 2022, catatan itu telah disampaikan Dewan Pers kepada khalayak melalui siaran pers. Isi siaran pers inilah yang juga bisa Anda simak pada salah satu rubrik di edisi kali ini. Salah satunya yang ditekankan Dewan Pers adalah tentang pengesahan RKUHP yang dilakukan pada 6 Desember 2022 lalu, telah menjadi "kado pahit" bagi ekosistem pers nasional.

Apa pun situasi pers yang berkembang sepanjang 2022, bagi Dewan Pers tidak ada pilihan selain terus-menerus menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, sebagaimana amanat UU No 40/1999 tentang Pers. Itulah muruah Dewan Pers yang bersama konstituen akan terus mendukung terpeliharanya kemerdekaan pers dan independensi pers Indonesia. Sekaligus itu mendorong terus berkembangnya jurnalisme berkualitas dan perusahaan pers yang profesional.

Begitulah pembaca, sejumlah tulisan menarik seperti biasanya juga kami hadirkan pada edisi Desember 2022. Baik yang ditulis oleh tim internal ETIKA maupun kontribusi dari penulis luar. Anda bisa menyimak semua itu di rubrik Opini, Teropong, hingga Lintas Berita sepanjang Desember 2022. Selamat menikmati edisi akhir tahun 2022 dengan semangat baru menyongsong 2023 dan tetaplah senantiasa berpikir merdeka. Salam kemerdekaan pers!

Anggota Dewan Pers



Kali kedua Dewan Pers menggelar hajatan tahunan berupa Anugerah Dewan Pers. Tema yang diusung dalam Anugerah Dewan Pers 2022 adalah Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa.

Tahun ini seluruh peserta berjumlah 177. Dari jumlah itu, 109 di antaranya merupakan jurnalis dan 68 lainnya adalah media/tokoh/masyarakat/pemerintah. Ada sedikit peningkatan dibanding tahun lalu yang sebanyak 164 peserta dan 46 di antaranya wartawan/jurnalis.

‘Karya para jurnalis sangat berkualitas. Ini membuat dewan juri cukup mengalami kesulitan untuk menentukan yang terbaik di antara yang baik,’ kata pelaksana tugas Ketua Dewan Pers, Mohamad Agung Dharmajaya.

Sedangkan Ketua Panitia Anugerah Dewan Pers 2022, Asmono Wikan, menyatakan pemberian anugerah ini merupakan barometer atau tolok ukur untuk karya jurnalistik yang berkualitas dan tata kelola perusahaan pers yang profesional. “Anugerah ini juga sebagai bentuk apresiasi bagi jurnalis serta literasi bagi masyarakat luas dalam upaya terus menjaga kemerdekaan pers,” tutur Asmono.

Malam puncak Anugerah Dewan Pers 2022 digelar di Hotel Trans Luxury Bandung pada 13 Desember. Hadir pula Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana, mantan Ketua Dewan Pers Prof Bagir Manan, Direktur Kerja Sama Bilateral Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol Kris Erlangga, Koordinator Staf Ahli Kapolri, Irjen Pol Risyapudin Nursin, dan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.



▲ Para pemenang Anugerah Dewan Pers bersama dengan anggota Dewan Pers dan para tamu VVIP berfoto bersama dalam acara Anugerah Dewan Pers 2022 pada Selasa (13/12/2022) di Bandung, Jawa Barat (FOTO: DEWAN PERS)

Terbaik

Sehari sebelumnya di tempat yang sama, dalam talkshow tentang Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa, Menko Polhkam, Moh Mahfud Md, menjadi pembicara kunci. Sedangkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menjadi narasumber bersama M Agung Dharmajaya, Nurlaela Arief (direktur komunikasi Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB) serta Agung Sedayu (wartawan Tempo).

Dari hasil penilaian mendalam, dewan juri menetapkan lima kategori terbaik untuk jurnalis dan dua perusahaan media. Adapun hasil penilaian dewan juri sebagai berikut.



Ini membuat dewan juri cukup mengalami kesulitan untuk menentukan yang terbaik di antara yang baik,”

M. Agung Dharmajaya
Plt Ketua Dewan Pers

Ahmad Thovan Sugandhi

Thovan dari detik.com memenangkan anugerah karya jurnalistik terbaik media siber. Karya yang dikerjakan bersama tim dengan judul “Korban Bechi: Disiksa, Diperkosa, Disekap, Dituduh PKI” itu dinilai memiliki bobot lebih dari pesaing lainnya.

Laporan yang mendalam dan narasumber beragam yang relevan menjadi kekuatan utama karya tersebut. Dia bisa melakukan liputan mendalam karena secara kebetulan juga tinggal di Jombang, kota yang menjadi wilayah terjadinya



▲ Anggota Dewan Pers bersama tamu VVIP dari BNPT dan Kepolisian berfoto bersama usai acara penghargaan Anugerah Dewan Pers 2022 pada Selasa (13/12/2022) di Bandung, Jawa Barat. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)



▲ Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019, Imam Wahyudi (kiri) menyerahkan trofi kepada pemenang kategori karya jurnalistik media siber terbaik Anugerah Dewan Pers 2022, Ahmad Thovan Sugandi (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

kasus pemerkosaan oleh anak kiai terhadap santri-santri di sana.

Sejak kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Thovan sudah aktif di lingkungan pers



“Penghargaan ini saya persembahkan untuk para penyintas yang berani bersuara dan memperjuangkan hak-haknya,” ujar Ahmad Thovan Sugandi.

kampus. Ia antara lain pernah pula menjadi jurnalis di media Gatra dan Bisnis Indonesia sebelum berlabuh di detikcom.

Ia mengakui, karyanya bisa terpilih sebagai yang terbaik dalam Anugerah Dewan Pers 2022 tak lepas dari dukungan dan kerja sama teman-temannya. “Penghargaan ini saya persembahkan untuk para penyintas yang berani bersuara dan memperjuangkan hak-haknya. Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk rekan rekan saya di detikX dan secara umum untuk semua pekerja di detik.com,” ungkapnya.

Thovan pun menyampaikan terima kasih atas anugerah yang ia terima.

“Saya ucapkan terima kasih ke Dewan Pers sebagai penyelenggara. Juga terima kasih untuk segenap dewan juri dan para panitia,” tuturnya. Ia berharap anugerah ini bisa terus berlanjut.

Ardi

Pria kelahiran Merauke, Papua, pada 13 Maret 1983 ini mendapat anugerah karya jurnalistik terbaik media radio. Karyanya berjudul *Membalut Luka di Tanah Papua*.



▲ Pemenang Karya jurnalistik terbaik kategori radio, Ardi (batik merah) saat menyampaikan pidato. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

Ia bisa dikatakan sebagai reporter spesialis meraih penghargaan. Tak terhitung banyaknya penghargaan yang pernah diterimanya. Sejak 2019, tak kurang dari 13 penghargaan pernah ia terima sebagai reporter radio.

Mulai dari menjadi yang terbaik pertama untuk Piala Presiden, anugerah Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Kominfo, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga ajang yang digelar PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Lalu menjadi terbaik kedua dalam lomba yang diadakan Polri, Kominfo, Swara Kencana, serta Universitas Indonesia. Kemudian beberapa kali merengkuh penghargaan terbaik ketiga untuk

lomba yang diadakan Pertamina dalam tiga tahun terakhir.

Bahkan tahun lalu, pria yang mengabdikan diri di Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke ini juga sempat menjadi nomine Anugerah Dewan Pers 2021. Namun, nasib baik belum memayunginya sehingga tidak berhasil mendapat anugerah tersebut.

Selain untuk seluruh jajaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Merauke, Ardi juga menyampaikan



“Penghargaan ini sekaligus bukti, bahwa kerja kaki dan kerja lapangan mendapat tempat dan apresiasi yang tinggi sebagai sebuah karya jurnalistik berkualitas dari Dewan Pers,” tutur Heru dengan nada bangga.

terima kasih pada panitia dan jajaran Dewan Pers. “Anugerah ini sangat berharga bagi saya. Sudah dua kali saya mengikuti anugerah ini. Pada tahun lalu kami sempat masuk sebagai nominasi dan syukur alhamdulillah pada tahun ini kami bisa tampil sebagai pemenang pada kategori wartawan radio,” ungkapnya.

Ia berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman jurnalis lainnya, terutama di tanah Papua, untuk terus berkreasi dengan menghasilkan karya jurnalistik yang profesional, berkualitas, dan tentunya lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat dan berdasar pada Kode Etik Jurnalistik. Secara khusus Ardi memotivasi para angkasawan dan angkasawati (jurnalis radio) agar dapat memacu diri meningkatkan kemampuan jurnalistiknya.

Agung Sedayu

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sempat terkejut ketika nama ini disebut. Hal itu karena nama Agung Sedayu sama persis dengan kelompok perusahaan properti raksasa yang berkantor pusat di Jakarta.

“Saya kira, saya akan berkenalan



▲ Ketua Dewan Pers 2010-2016, Bagir Manan (tengah) bersama anggota Dewan Pers periode 2010-2013, Bambang Harymurti (kiri) memberikan trofi kepada pemenang kategori karya jurnalistik cetak terbaik, Agung Sedayu. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

dengan pemilik usaha properti terkenal. Ternyata ini seorang wartawan,” kata Kang Emil, panggilan karib Ridwan Kamil. Memang tidak ada hubungan antara nama peraih karya jurnalistik terbaik media cetak itu dengan perusahaan properti raksasa Agung Sedayu Group, kecuali kesamaan nama yang kebetulan saja terjadi.



 Tarian mojang priangan sebagai salah satu hiburan di sela acara Anugerah Dewan Pers 2022. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, itu merengkuh Anugerah Dewan Pers 2022 atas karyanya yang berjudul Mudarat Pengadaan Darurat. Tulisan ini terkait dengan kisruh pengadaan alat Covid-19 yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah.

“Penghargaan yang kami dapat bersama tim ini merupakan titik balik jurnalisme investigasi yang belakangan dianggap kian memudar seiring perkembangan sosial media,” tutur Agung. Ia berharap, media-media di Indonesia bisa melakukan investigasi secara kolaboratif demi efisiensi dan hasil pemberitaan yang maksimal.

Lelaki kelahiran Kediri, Jawa Timur, 12 Maret 1979 ini juga telah

beberapa kali memperoleh anugerah atas karya-karya jurnalistiknya. Kiprah lulusan sastra Inggris Universitas Jember sebagai jurnalis dimulai sejak bergabung dengan Tabloid Ideas pada 2002.

Ia menyebut tantangan sebagai jurnalis kian berat. Itu lantaran perkembangan media sosial yang membuat siapa pun bisa menjadi pewarta tanpa harus menjadi wartawan.

Sebagai motivasi untuk menguji keterampilan jurnalistik insan pers, ia meminta anugerah semacam ini bisa terus berlanjut. “Terima kasih untuk Dewan Pers yang terus mendorong kualitas jurnalis kita,” papar Agung.

Heru Sri Kumoro

Pria dari Gunungkidul, Yogyakarta,

ini menganut paham bahwa jurnalistik adalah kerja kaki dan kerja lapangan. “Penghargaan ini sekaligus bukti, bahwa kerja kaki dan kerja lapangan mendapat tempat dan apresiasi yang tinggi sebagai sebuah karya jurnalistik berkualitas dari Dewan Pers,” tutur Heru dengan nada bangga.

Heru meraih anugerah terbaik untuk karya foto jurnalistik. Di samping untuk para kru foto di Harian Kompas tempatnya bekerja, ia mempersembahkan karya tersebut untuk para pejuang keluarga yang keluar rumah saat subuh dan balik ke rumah malam hari demi keluarga.

“Penghargaan ini juga untuk bapak-bapak badut jalanan yang mencari nafkah buat keluarga,” pa-



▲ Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro (kiri) menyerahkan trofi kepada pemenang kategori karya jurnalistik foto terbaik, Heru Sri Kumoro. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

parnya. Karyanya yang diberi judul Fenomena Badut Jalanan itu memang berhasil memikat dewan juri untuk memilihnya sebagai yang terbaik.

Lahir di Gunungkidul pada 26 Februari 1980, selepas SMA, ia melanjutkan kuliah pada Universitas Sebelas Maret Surakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi komunikasi massa. Dunia fotografi ia geluti sejak masuk Harian Kompas pada 2004. Sebelum ke Jakarta, ia pernah bertugas di Yogyakarta, Semarang, Solo, dan Surabaya.

Liputan besar dan menantang pernah dia jalani. Tugas berat itu antara lain saat terjadi tsunami di pesisir Selatan Pulau Jawa, Ekspedisi Cincin Api, Ekspedisi Tanah Papua, Ekspedisi Bengawan Solo, dan lain-lain. Pelbagai anugerah lain pernah pula dia peroleh, di antaranya dua kali dari Pewarta Foto Indonesia, lomba foto perbankan, pendidikan, dan sebagainya.

“Saya sangat berharap Anugerah Dewan Pers ini akan terus konsisten digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap karya jurnalistik di tengah minimnya apresiasi terhadap karya jurnalistik berkualitas.

Semoga Anugerah Dewan Pers ini menjadi penyemangat dan pelecuk bagi insan pers untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab. Panjang umur perjuangan kerja kerja jurnalistik yang berkualitas dan berintegritas,” tuturnya.

Riandi Akbar

Wajah cerah terpancar dari roman muka Riandi. “Saya sangat senang mendapatkan penghargaan kategori karya jurnalistik terbaik televisi. Ini juga menjadi kali pertama saya dan DAAI TV Jakarta mendapatkan penghargaan dari Dewan Pers secara pribadi,” ujarnya dengan penuh senyum.



“Mengupayakan jurnalisme berkualitas adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan menjaga kemerdekaan pers,” papar Yogi Arief Nugraha.

Pria kelahiran Ciawi, Bogor, Jawa Barat, tersebut menilai ini merupakan ajang apresiasi bagi insan jurnalistik. Harapannya tentu saja ajang semacam ini bisa berlanjut terus dan tidak terhenti sampai tahun ini saja.



▲ Riandi Akbar (kiri), didampingi rekannya menyampaikan pidatonya sebagai Pemenang kategori karya jurnalistik terbaik Anugerah Dewan Pers 2022. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

Karyanya berjudul Melawan Sesak telah dinobatkan sebagai yang terbaik untuk kategori karya jurnalistik televisi. Liputan Riandi ini mengisahkan tentang perjuangan warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, untuk mendapatkan hak udara bersih di tengah kepungan polusi debu batubara.

“Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam Anugerah Dewan Pers 2022. Semoga tahun depan kita semua masih bisa bertemu di ajang serupa ini. Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk saudara-saudara kita di Marunda yang masih berjuang melawan polusi udara dan debu batubara,” kata Riandi.

Lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2018 itu merintis karier jurnalistiknya di Radar Bogor. Setelah itu ia sempat berlabuh di Bintang Mas Mediautama sebelum akhirnya bergabung dengan DAAI TV Jakarta.

Majalah Tempo

Majalah berita mingguan Tempo kembali menyabet anugerah sebagai perusahaan pers terbaik untuk kategori jumlah karyawan hingga 100 orang. Tempo yang pertama kali terbit pada 6 Maret 1971



Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto (kiri) menyerahkan trofi kepada Kompas TV yang diwakili oleh Abie Besman (kanan) selaku Executive Producer Kompas TV sebagai penerima penghargaan Anugerah Dewan Pers 2022. Anugerah Dewan Pers 2022 sebagai media terbaik untuk jumlah karyawan di atas 100 orang. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

itu dianggap unggul oleh dewan juri dalam hal pengelolaan media dan sikap dalam menjaga kemerdekaan pers.

Visi dan misi media ini adalah menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Sajian-sajian Tempo memang menunjukkan adanya indikasi kemerdekaan pers dan sikap independen terhadap pemerintah era siapa pun.

Tempo berpendapat asas jurnalisisme yang diusung bukanlah yang memihak satu golongan. Menurut Tempo, tugas pers bukanlah menyebarkan prasangka, justru

melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan sebuah saling pengertian. Jurnalisme yang dikembangkan Tempo bukan memaki atau mencibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba.

Dalam pandangan Tempo, independensi adalah sikap dasar media. Keputusan untuk memberitakan atau tidak memberitakan peristiwa semata-mata karena pertimbangan jurnalistik, yaitu untuk menemukan kebenaran dan melayani hak publik untuk mendapatkan informasi, bukan karena pertimbangan yang lain, seperti ekonomi (karena pengaruh iklan dan bisnis) atau politik (karena pengaruh pemilik dan koneksi).

Dengan sikap seperti ini, sangat jelas bahwa seorang jurnalis atau media yang membuat (atau tidak membuat) berita karena pengaruh nyata dari kepentingan bisnis, pengaruh politik, atau pembaca, itu menabrak prinsip independensi yang harusnya dipegang oleh jurnalis dan media. Memiliki 45 karyawan, segmentasi utama pembaca Majalah Tempo adalah kelompok menengah ke atas.

Atas Anugerah Dewan Pers kedua kali untuk kategori perusahaan pers ini, redaktur Tempo yang mewakili manajemen, Agung Sedayu, menyatakan terima kasih kepada Dewan Pers, panitia, juga dewan juri yang memberi penghargaan kepada majalah Tempo. "Tahun yang lalu juga kami mendapat



◀ Menutup acara, penyanyi Yura Yunita menghibur para tamu undangan di acara Anugerah Dewan Pers 2022 pada Selasa (13/12/2022) di Bandung, Jawa Barat. (FOTO: MONUMEN PERS NASIONAL)

penghargaan. Semoga kami bisa tetap konsisten mengawal kemerdekaan pers dan juga fungsi pers sebagai alat kontrol dan sekaligus untuk mencerdaskan masyarakat,” urai Agung.

Kompas TV

Media televisi ini memilih lebih fokus pada konten berita. Mulai mengudara pada 1 Agustus 2011, Kompas TV bertekad punya peran dalam menciptakan kemanusiaan yang beriman, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memanusia-manusia.

Dengan total 975 karyawan, Kompas TV ingin menjadikan karya jurnalistiknya sebagai solusi persoalan bangsa secara menyeluruh. Selain itu, Kompas TV berupaya terus menjaga ekosistem media yang kuat melalui karya-karya jurnalistik berkualitas dan mampu

mengantisipasi disrupsi digital sebagai sebuah keniscayaan.

Kompas TV mendapat Anugerah Dewan Pers 2022 sebagai media terbaik untuk jumlah karyawan di atas 100 orang. Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV, Yogi Arief Nugraha, mengutarakan penganugerahan ini sejalan dengan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan pers di tanah air dalam mendorong peningkatan kualitas karya jurnalistik di Indonesia.

“Mengupayakan jurnalisme berkualitas adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan menjaga kemerdekaan pers. Anugerah Dewan Pers bukan sekadar mengapresiasi karya jurnalistik yang baik tetapi sekaligus menjadi pengingat agar seluruh insan pers dan institusi media berkomitmen secara sungguh-sungguh menghasilkan karya-

karya jurnalistik yang merdeka dan jernih demi kemajuan peradaban bangsa. Kami mengapresiasi Dewan Pers atas segala upaya menjaga kemerdekaan pers di Indonesia,” paparnya.

Ia berharap supaya ajang tahunan ini terus bisa menguji kedalaman substansi karya-karya jurnalistik yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, hal tersebut bisa menjadi ruang belajar dan bertukar gagasan antar-ruang redaksi dan bukan sekadar kontes serta seremonial panggung formal.

Media dengan segmen utama kelas menengah dan atas itu membawa ideologi independen dan humanis. Kompas TV akan senantiasa berpijak pada ide dan gagasan yang baik serta memberi ruang kepada semua pihak tanpa melihat asal-muasal manusia, baik suku, golongan, agama, dan kelompok sepanjang berorientasi pada perbaikan bangsa dan negara.

Untuk masalah independensi, awak Kompas TV akan membawanya dalam praktik jurnalistik sehari-hari dengan membuka dan memberikan tempat kepada semua pihak. Kompas TV akan mengambil posisi sebagai institusi forum publik yang mempertemukan semua ide dan gagasan positif. **Arif Supriyono, tenaga ahli Dewan Pers**

Mendung di Ujung 2022



Oleh **Arif Supriyono ***

RODA perjalanan tahun 2022 telah sampai di titik akhir. Sebagaimana lazimnya, aneka peristiwa senantiasa mewarnai kehidupan pers nasional setiap tahunnya. Ada peristiwa-peristiwa ringan hingga yang masuk kategori berat. Ada kejadian-kejadian yang menggembirakan, namun masih pula muncul beberapa hal yang memprihatinkan.

Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 yang bertengger di angka 77,88, sekilas menyiratkan optimisme akan ekosistem pers nasional. Angka IKP di posisi itu bermakna, bahwa kemerdekaan pers nasional berada dalam kondisi cukup baik dan sekaligus menunjukkan kenaikan 1,86 poin dari tahun sebelumnya.

Kenaikan IKP itu ternyata juga masih juga diwarnai kejadian yang mengganggu kemerdekaan pers. Tak kurang dari 50 peristiwa kekerasan di 19 provinsi dialami oleh para jurnalis. Data ini sudah barang tentu bertolak belakang dengan angka IKP yang dalam lima tahun terakhir ini terus memperlihatkan kecenderungan meningkat.

Terbetik pula kabar tatkala Kapolres Sampang, AKBP Arman, menyatakan tidak akan melayani wartawan yang belum lulus uji kompetensi maupun media yang belum tersertifikasi oleh Dewan Pers. Kabar ini tentu saja mencautkan optimisme dan sesuai dengan harapan Dewan Pers. Keberanian pejabat untuk tidak melayani wartawan dan media abal-abal akan sangat mendukung upaya peningkatan profesionalisme pers di tanah air.

Kabar positif lainnya datang dari peradilan. Semua bermula dari pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Dewan Pers kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh tiga orang pada 12 Agustus 2021. Proses panjang persidangan pun tak terhindarkan.

Penggugat mengajukan tuduhan, bahwa pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers. Ketiga orang tersebut menuding, hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi

pers. Hal itu mereka anggap sebagai monopoli peraturan tentang pers. Di samping itu, mereka juga menilai Dewan Pers sama sekali bukan lembaga yang independen. Dalam pandangan ketiga orang tersebut, ketidakindependenan Dewan Pers terjadi lantaran surat keputusan penetapan anggota Dewan Pers ditandatangani oleh presiden.

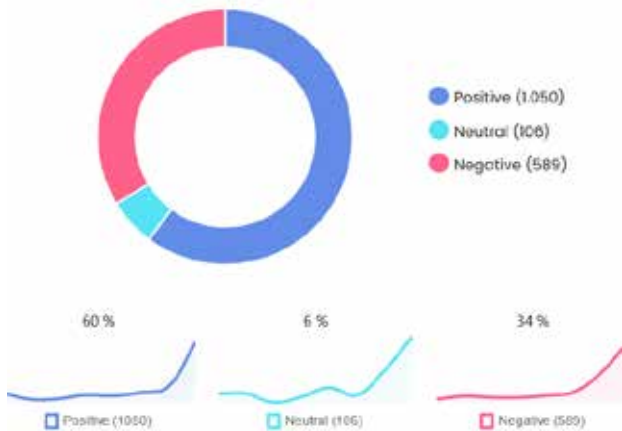
Tuduhan itu akhirnya terbantahkan. Dalam sidang pada 31 Agustus 2022, putusan MK yang dibacakan ketuanya, Anwar Usman, menolak seluruh gugatan yang ada. Menurut MK, Dewan Pers tidak memonopoli pembuatan aturan untuk organisasi pers. Dewan Pers hanya memfasilitasi pembahasan bersama konstituen dalam pembuatan peraturan untuk organisasi pers. MK juga menyatakan, independensi Dewan Pers tetap terjaga karena dalam proses pemilihan anggota dilakukan oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) yang dibentuk konstituen dan sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah.

Putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pers adalah absah dan tidak boleh ada lagi organisasi lain yang mengatasnamakan lembaga serupa. Oleh karenanya, uji kompetensi wartawan (UKW) haruslah tetap mendapat persetujuan Dewan Pers dan verifikasi media hanya bisa dilakukan Dewan Pers.

Pemberitaan tentang uji materi UU Pers ini juga menjadi perhatian media nasional. Sepanjang September hingga Desember 2022, tak kurang dari 1.745 berita tentang UU Pers dan uji materi di MK muncul. Sebanyak 60% memberi sentimen positif atau mendukung UU Pers, 34% negatif, dan 6% netral.

Tak lama berselang setelah kabar menggembirakan, suasana mendung menyelimuti dunia pers nasional. Keputusan pemerintah (dan DPR) untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP menjadi undang-undang (KUHP), pada 12 Desember 2022, bak palu godam yang berdentum keras.

Sentimen Pemberitaan terhadap Gugatan UU Pers



Keterangan: Data dari Binokular

Betapa tidak, RKUHP yang kontroversial itu ternyata masih tetap memuat pasal-pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Masukan Dewan Pers dengan melakukan reformulasi atas 22 pasal bermasalah (dalam 9 kluster) tak dihiraukan pemerintah. Padahal, sebelum menyusun reformulasi, Dewan Pers telah melakukan audiensi dengan para pakar hukum, juga bertemu dengan Wakil Menkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, dan Menko Polhukam, Moh Mahfud Md.

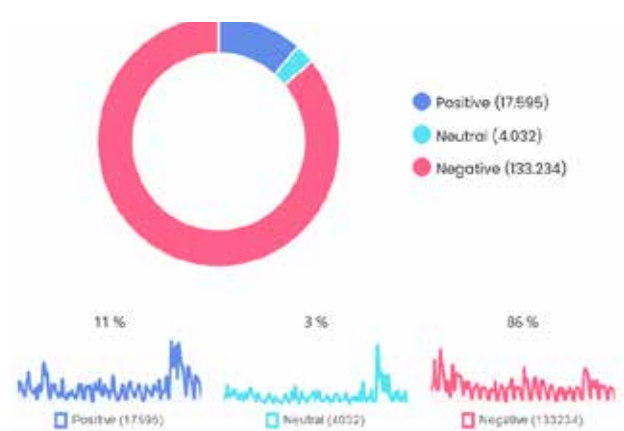
Draf reformulasi itu juga diserahkan ke banyak fraksi di Komisi III DPR. Bahkan Dewan Pers juga diundang dalam rapat dengar pendapat umum membahas RKUHP di Komisi III DPR. Pujian pun datang dari para anggota Komisi III DPR atas reformulasi yang disampaikan Dewan Pers. Nyatanya, reformulasi 22 pasal itu tidak masuk dalam KUHP yang telah disahkan. Hanya ada satu pasal yang diakomodasi. Itu pun cuma disinggung di bagian penjelasan.

Rupanya perjuangan semua insan pers, Dewan Pers, dan konstituen untuk mengawal kemerdekaan pers belumlah selesai. Kritikan atas KUHP itu harus terus digaungkan. Bahkan saat nanti KUHP benar-benar berlaku, jika memang ini menjadi satu-satunya jalan, upaya melakukan uji materi atas pasal-pasal bermasalah di KUHP perlu ditempuh.

Tak hanya insan pers, komponen masyarakat lainnya juga banyak yang keberatan atas pasal-pasal KUHP tersebut. Tak sedikit pula yang menilai, misi melakukan dekolonisasi KUHP lama peninggalan Belanda bisa dikatakan gagal total lantaran kandungan isi di KUHP baru juga sarat dengan pasal karet dan bersifat lebih kolonial. Pasal ujaran kebencian dan penghinaan dimunculkan lagi. Kebencian dan penghinaan atas lembaga negara (juga presiden) pun bisa diajukan ke pengadilan.

Dalam kondisi seperti itu, Dewan Pers harus menyatukan pandangan dengan konstituen untuk menyikapi

Sentimen Pemberitaan terhadap Isi RKUHP



Keterangan: Data dari Binokular

KUHP tersebut. Amanat UU Pers menyatakan, salah satu fungsi Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Tak boleh ada yang apatis atas keadaan ini. Dengan kemerdekaan perslah kualitas jurnalistik dan profesionalisme jurnalis akan lebih mudah terwujud sehingga pers punya peran optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kritik kencang media juga bergema keras atas keberadaan RKUHP. Selama periode Agustus-Desember 2022, ada 1544.861 berita yang terkait RKUHP. Sebanyak 86% bernada negatif atas keberadaan RKUHP tersebut, 11% bernilai positif, dan 3% bersifat netral.

Mendung KUHP belum berarak pergi, ada lagi kasus ditemukannya intelijen polisi yang pernah menjadi kru atau koresponden TVRI Blora, Jawa Tengah, selama 14 tahun. Ini jelas menodai dan ada campur tangan pihak lain atas kemerdekaan pers. Apalagi dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) disebutkan, bahwa wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi, dalam arti mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas, sebelum informasi itu menjadi pengetahuan umum. Tugas intel tentulah mengambil informasi yang diperoleh sebelum menjadi berita.

Intel itu juga anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan sudah lulus uji kompetensi. Sedangkan dalam uji kompetensi yang diadakan PWI, si wartawan harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan anggota humas pemerintah, PNS/ASN, TNI, dan Polri.

Belajar dari kasus-kasus di atas, seyogianya intensitas hubungan Dewan Pers dan konstituen harus semakin ditingkatkan. Informasi intensif dari dua arah Dewan Pers dan konstituen amat diperlukan untuk menjaga dan memperjuangkan kemerdekaan pers. Selain makin peduli terhadap konstituen dan insan pers, Dewan Pers pun perlu terus menjadi mitra yang kritis pada pemerintah.

*) *Tenaga Ahli Dewan Pers*

Menjaga dan Terus Memperjuangkan Kemerdekaan Pers



A Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP pada Selasa (06/12/2022) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (SUMBER FOTO: YOUTUBE DPR RI)

Akhir yang pahit bagi insan pers mewarnai perjalanan tahun 2022. Upaya Dewan Pers dan semua konstituen untuk memperbaiki Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak membuahkan hasil memadai. Ujung dari perjuangan insan pers adalah diberlakukannya KUHP tanpa memasukkan usulan reformulasi yang disampaikan Dewan Pers.



Seorang intel jelas akan mencari info di balik berita untuk kepentingan instansinya.

Ayat-ayat RKUHP yang dianggap bermasalah dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers tidak mengalami perubahan hingga akhirnya disahkan. Kritik dan masukan semua komponen insan pers atas ayat-ayat itu seolah hanya lewat saja tanpa terserap. Sudah barang tentu insan pers banyak yang kecewa dengan fakta tersebut.

Dari hasil kajian Dewan Pers, paling tidak ada 22 ayat (dalam 9 kluster) RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Gangguan, apalagi ancaman, kemerdekaan pers merupakan suatu hal yang bersifat substantif. Dalam UU Nomor 40 tentang Pers pun jelas ditegaskan, bahwa salah satu fungsi utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Kemerdekaan pers adalah hulu. Dengan kemerdekaan pers akan lahir pers yang independen, profesional, kompeten, dan jujur. Amanat UU itu jelas membuat tidak ada pilihan lain bagi Dewan Pers kecuali terus memperjuangkan kemerdekaan pers bersama konstituen.



Tinta hitam kemerdekaan pers bertambah lagi dengan terungkapnya kasus seorang intel polisi yang menjadi kontributor TVRI di Blora, Jawa Tengah, selama 14 tahun. Paling tidak ada dua ‘kesalahan’ mendasar jika seorang intel menjadi wartawan, apa pun status wartawan tersebut.

Pertama, ada campur tangan pihak lain (intel) dalam pelaksanaan kemerdekaan pers. Kedua, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) jelas menyatakan, bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan profesi bermakna mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas, sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Seorang intel jelas akan mencari info di balik berita untuk kepentingan instansinya.



Pelantikan Iptu Umbaran Wibowo dan sejumlah Kapolsek di lingkungan Polres Blora, pada Senin (12/12/2022).
(SUMBER FOTO: TIM TVONE - DIDDIET CORDIAZ)



Dalam UU Nomor 40 tentang Pers ditegaskan, bahwa salah satu fungsi utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

Belum lagi intel kepolisian tersebut juga menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan telah lulus menjalani uji kompetensi wartawan (UKW). Setiap anggota PWI yang ikut uji kompetensi harus menandatangani surat pernyataan yang isinya antara lain wartawan tersebut tidak menjadi bagian dari humas pemerintah, partai politik, PNS/ASN, serta TNI/Polri dan siap dicabut sertifikat kompetensi wartawannya. Dengan demikian, intel tersebut jelas membuat pernyataan bohong.

Adanya pelbagai fakta seperti itu, termasuk kasus kekerasan terhadap wartawan yang juga belum reda, Dewan Pers berkomitmen untuk bersama-sama konstituen memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan pers. Selain itu menjaga independensi dan profesionalisme pers juga menjadi prioritas Dewan

Pers. Berikut ini adalah jejak Dewan Pers 2022 dalam menjaga independensi, kemerdekaan pers, profesionalisme, dan perlindungan pada insan pers.

1. Bersama konstituen meminta masukan para pakar hukum untuk menyusun reformulasi 22 pasal RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Dewan Pers menemui Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej, dan Menko Polhukam, Moh Mahfud Md, untuk memberi masukan RKUHP. Menyerahkan reformulasi 22 pasal RKUHP ke semua fraksi di Komisi III DPR dan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR tentang RKUHP. Setelah ditetapkan menjadi KUHP, dari masukan 22 pasal, hanya satu pasal yang disinggung dalam penjelasan KUHP.
2. Membuat perjanjian kerja sama dengan Polri untuk menyelesaikan setiap sengketa pemberitaan lewat Dewan Pers lebih dulu. Jika sengketa itu tidak masuk ranah jurnalistik, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Polri.
3. Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) untuk 2022. Hasilnya, IKP 2022 mencapai 77,88 yang artinya kemerdekaan pers cukup bagus. Meski demikian, Dewan Pers menyangkan masih cukup banyaknya (55 kasus di 19 provinsi) kasus kekerasan terhadap jurnalis.
4. Selama 2022, ada 663 kasus pengaduan pemberitaan ke Dewan Pers. Dengan target penyelesaian 90%, sebanyak 663 kasus (95,9%) bisa terselesaikan dan 28 kasus lain dalam proses penyelesaian.
5. Dewan Pers juga melakukan verifikasi terhadap media yang mendaftarkan diri. Sebanyak 98




*Dewan Pers
memenangkan
gugatan pihak
ketiga (uji
materiil) atas
UU Pers dan
keberadaan
Dewan Pers
dalam sidang
di Mahkamah
Konstitusi
(MK)*

media dinyatakan terverifikasi dan sisanya menjalani pendampingan untuk dilakukan verifikasi lagi di kemudian hari. Media yang mengajukan diri untuk diverifikasi, kebanyakan mengalami kendala dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi. Selain itu, selama ini belum ada belum ada prosedur standar pengajuan verifikasi. Untuk itu Dewan Pers telah membuat prosedur standar operasi (PSO) untuk verifikasi faktual dan pedampingan.

6. Dewan Pers memenangkan gugatan pihak ketiga (uji materiil) atas UU Pers dan keberadaan Dewan Pers dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan gugatan itu ditolak seluruhnya dan putusan tersebut bersifat final serta mengikat.
8. Dewan Pers juga sedang digitalisasi situs Dewan Pers. Tujuannya untuk pengayaan data jurnalis yang bersertifikat, data perusahaan/media terverifikasi, proses pengaduan, dan lain-lain. Pada intinya, pihak pemilik akun yang bersangkutan nantinya akan diberi *password* dan secara otomatis bisa menambahkan sendiri informasi yang dipandang perlu dalam konten akunnya.

Kami menyampaikan SELAMAT TAHUN BARU 2023 kepada semua insan pers tanah air. Mari kita rawat, jaga, dan perjuangkan bersama kemerdekaan pers demi peningkatan kualitas pers nasional dan kemajuan peradaban bangsa. Semoga sukses untuk pers nasional kita. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan insan pers. **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**



 Penyelesaian pengaduan antara Didik T. Wahyudi SH., MH. (LBH Gema Perhutanan Sosial Indonesia) terhadap Majalah Tempo dan pengaduan TVRI terhadap fajarasia.co, pada Senin (19/12/2022) di Bekasi, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

GRAFIK

Laporan Kasus Pengaduan Desember 2022



Risalah No 86
Moch Ojat Sudrajat dengan Kalteng Pos

Risalah No 87
Enung Komalasari dengan obormerahnews.com

Risalah No 88
Muhamad Rizki dengan sibayaknews.com

Risalah No 89
Widya Pratiwi dengan infomalukunews.com

Risalah No 90
Linda Wati dengan portalbuananew

Risalah No 91
LPP TVRI dengan fajarasia.co

SURAT



0 Surat
Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

31 Surat
Surat Undangan Mediasi.

66 Surat
Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

86 Surat
Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

PPR: 46 PPR

terhadap jejakopd.com atas pengaduan Sri Marlinda

PPR: 47 PPR

terhadap mediarealitas.com atas pengaduan Yundi Mauliza



Dewan Pers Bentuk Tim Khusus Pengaduan Pemberitaan Pemilu

JAKARTA--Dewan Pers memberi perhatian besar terhadap situasi tahun politik pada 2023 mendatang. Untuk itu Dewan Pers akan membentuk tim yang menangani pengaduan yang terkait dengan pemberitaan politik dan pemilu.

“Kami akan membentuk tim khusus sengketa atau pengaduan pemberitaan pemilu. Ini agar penyelesaian kasus pengaduan terkait pemilu dapat diselesaikan cepat, sesuai waktu penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers

▲ Tim Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers berfoto bersama usai melaksanakan mediasi pada Senin (19/12/2022) di Bekasi, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)



Kami akan membentuk tim khusus sengketa atau pengaduan pemberitaan pemilu. Ini agar penyelesaian kasus pengaduan terkait pemilu dapat diselesaikan cepat, sesuai waktu penyelenggaraan pemilu.”

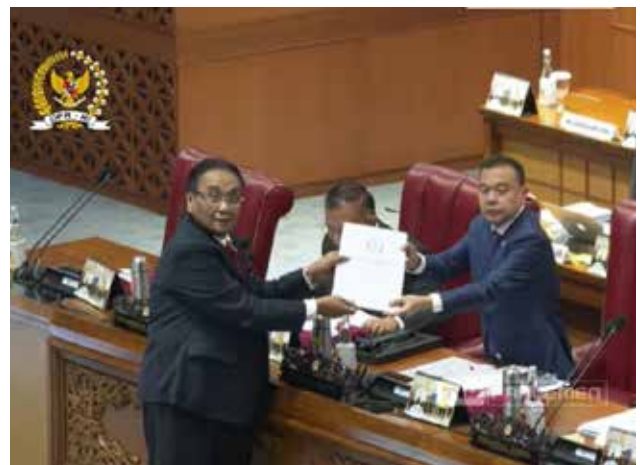
pedoman pada kode etik jurnalistik. Dewan Pers mengimbau pada seluruh media berbagai platform agar menjaga kehidupan pers yang sehat. Semua media diharapkan menjunjung tinggi etika dan patuh pada norma-norma sosial maupun agama yang disepakati bersama dan yang berlaku di masyarakat.

Dewan Pers: UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi

Dewan Pers, Yadi Hendriana, Senin (5/12) di Jakarta.

Ia mengingatkan para pekerja pers agar selalu meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan ber-

JAKARTA--Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah untuk disahkan menjadi UU KUHP dalam sidang paripurna DPR pada Selasa, 6 Desember 2022



▲ Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto (kiri) bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP pada Selasa (06/12/2022) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (SUMBER FOTO: YOUTUBE DPR RI)

di Jakarta. Dewan Pers menyetujui keputusan itu diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers.

Ini mengingat masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. Sejumlah pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP. "Kami menilai ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam RUU KUHP yang baru disetujui oleh pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi UU KUHP itu tidak hanya mengancam dan mencederai kemerdekaan pers, namun juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi," kata Arif Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers dalam siaran pers Dewan Pers pada 7 Desember 2022.



Pedoman ini mengatur, bahwa akun medsos resmi yang dikelola perusahaan pers wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari institusinya. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang dimuat di akun medsosnya."

Dewan Pers Terbitkan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers

JAKARTA -- Dewan Pers menyusun Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers. Penyusunan pedoman ini dilakukan Dewan Pers bersama konstituen yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

"Pedoman ini mengatur, bahwa akun medsos resmi yang dikelola perusahaan pers wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari institusinya. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang dimuat di akun medsosnya," kata Ketua Komisi Hukum dan

Perundang-Undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, di Jakarta, Kamis (8/12).

Ia menambahkan, pedoman ini melingkupi ketentuan mengenai akun medsos perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia yang mengunggah konten berupa artikel, gambar, komentar, suara, video serta berbagai bentuk unggahan lainnya. Perusahaan pers bertanggung jawab memoderasi komentar buatan pengguna di akun medsosnya.

Menkopolkam: Kebebasan Pers Harus Ada untuk Bangun Peradaban Bangsa

BANDUNG -- Dunia pers nasional saat ini berada dalam kondisi cukup bebas untuk men-



▲ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, hadir sebagai pembicara utama dalam Talkshow "Jurnalisme Berkualitas Untuk Peradaban Bangsa" pada Senin (12 Desember 2022) di Bandung, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ Para Pemenang Festival Kreatif Mahasiswa berfoto bersama dengan anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu (tengah, batik cokelat) dan Asmono Wikan (tengah, kemeja putih) di akhir acara talkshow “Jurnalisme Berkualitas Untuk Peradaban Bangsa” pada Senin (12 Desember 2022) di Bandung, Jawa Barat.

yampaikan berita dan informasi kepada publik. Hal ini berdasarkan capaian survei Indeks Kemerdekaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers pada tahun 2022 sebesar 77,88%. Bagi pemerintah, tentu hasil itu menggembirakan serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan karena kebebasan pers harus ada untuk membangun peradaban bangsa. Meski begitu, pemerintah juga tidak menutup mata bahwa terdapat beberapa hal dalam dunia pers yang harus dibenahi agar iklim dan ekosistem pers menjadi lebih baik lagi.

Demikian pesan kunci dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD, yang hadir sebagai pembicara kunci dalam talk show bertemakan “Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa” pada Senin (12/12/2022) di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh Dewan Pers

dalam rangka Anugerah Dewan Pers 2022. Mahfud menekankan, pers memiliki kedudukan sangat penting dan dibutuhkan banyak pihak. Sebagai seorang pejabat negara, ia mengakui bahwa pers amat penting dalam perjalanan tugasnya.

Mahasiswa Denpasar dan Malang Menangkan Festival Kreatif Dewan Pers

BANDUNG--Rangkaian acara Anugerah Dewan Pers juga menghadirkan ajang Festival Kreatif Mahasiswa yang mengajak para mahasiswa untuk membuat konten tentang dunia jurnalistik di media sosial. Bertepatan dengan talk show “Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa”, pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah



▲ (atas) Anggota Dewan Pers, Asmono Wikan menyerahkan hadiah kepada juara pertama untuk kategori Tulisan, penghargaan diberikan kepada M. Kholilur Rohman.

(bawah) Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu menyerahkan hadiah kepada juara pertama untuk kategori video, penghargaan diberikan kepada Faradita Putri Aura Maharani. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)

pun digelar pada Senin (12/12/2022) di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat.

Festival Kreatif Mahasiswa terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori tulisan dan video. Para pemenang berhasil menyisihkan puluhan karya yang dikirimkan para mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia.

Pada kategori video, penghargaan diberikan kepada Faradita Putri Aura Maharani dari Universitas Pendidikan Nasional Denpasar (juara 1), Dzaki Aziz Naufal Alif dari

Universitas Diponegoro Semarang (juara 2), Ferdinand Andre Tatontos dari Universitas Indonesia Jakarta (juara 3), serta Marga Tri Santika dari STAHN MPU Kuturan Singaraja Bali dan Annisa Nuratin dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta sebagai juara favorit.

Sementara pada kategori Tulisan, penghargaan diberikan kepada M. Kholilur Rohman dari UIN Malik Ibrahim Malang (juara 1), Irmalasari dari Universitas Hasanuddin Makassar (juara 2), Eka Sandri Yusuf dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo (juara 3), serta Andini Pradya Savitri dari Institut Seni Indonesia Surakarta dan MR Firmansyah dari UPN Veteran Yogyakarta sebagai juara favorit. *Imam Suwandi*



KOMISI Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers menyelenggarakan kegiatan pendalaman materi dan diskusi untuk beberapa peserta Pelatihan Calon Penguji (Training of Traine) Uji Kompetensi Wartawan pada Selasa (20/12/2022) di Bekasi, Jawa Barat. (FOTO—FOTO: DEWAN PERS)



KEGIATAN ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dari para peserta Training of Traine (ToT) Uji Kompetensi Wartawan dikarenakan para peserta tersebut belum memenuhi standar Dewan Pers.



DEWAN Pers menerima kunjungan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal pada Rabu (21/12) di Hall Dewan Pers, Jakarta.



DIDAMPINGI Sekretaris Dewan Pers, Syaefudin (kiri), dan Tenaga Ahli Dewan Pers, Sudrajat (batik cokelat), Anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu (kerudung ungu), menjelaskan tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pers. (FOTO=FOTO: DEWAN PERS)



KOMISI Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers melakukan verifikasi secara faktual terhadap media Republika.co.id dan inilah.com pada Kamis (22/12/2022) di Jakarta.



VERIFIKASI faktual tersebut di pimpin oleh Pokja Dewan Pers, Pembina Karo didampingi oleh staff Dewan Pers, Syafitri dan Watini. (FOTO=FOTO: DEWAN PERS)



KOMISI Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers melakukan verifikasi secara faktual terhadap media ipol.id dan nonstopnews.id pada Jumat (23/12/2022) di Tangerang Selatan, Banten.



VERIFIKASI faktual tersebut di pimpin oleh Pokja Dewan Pers, Pembina Karo didampingi oleh staff Dewan Pers, Syafitri dan Watini. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



DEWAN Pers melakukan kunjungan ke Polda Bali pada Selasa (6/12/2022) di Denpasar, Bali.

Dalam kunjungan tersebut Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (kemeja putih) didampingi anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (batik hitam) dan Totok Suryanto (kemeja abu-abu), menyampaikan apresiasi atas suksesnya pengamanan KTT G20 oleh Polri.

(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers mengadakan rapat bersama seluruh Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja (Pokja) pada kami (15/12/2022) di Kota Tangerang, Banten.

Agenda rapat tersebut adalah Evaluasi Program Kerja Akhir Tahun 2022 Rapat implementasi dan sinkronisasi program Kerja untuk Tahun 2023. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers menggelar talkshow bertema “Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa” pada Senin (12/12/2022) di Hotel Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD, hadir sebagai pembicara utama sedangkan Plt, Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Wartawan Tempo, Agung Sedayu; menjadi bintang tamu dalam talkshow tersebut.. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





ORANG-orang di balik layar terlaksananya talk show “Jurnalisme Berkualitas untuk Peradaban Bangsa” pada Senin (12/12/2022) dan Anugerah Dewan Pers 2022 pada Selasa (13/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)

